

PERUBAHAN LEGITIMASI PENUNTUTAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN RI)

FEBRINA RAHMAWATI

Abstrak

Institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Yuridiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku. Namun berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan RI dapat menjembatani kebutuhan penuntutan pidana subjek hukum sipil maupun subjek hukum militer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan legitimasi penuntutan militer di Indonesia dengan dibentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini difokuskan pada undang-undang yang berkaitan dengan struktur dan bagaimana proses atau prosedur-prosedur penegakan hukum militer dalam sistem penuntutan militer

Kata Kunci : Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pidana Koneksitas.

**CHANGE IN THE LEGITIMACY OF MILITARY
PROSECUTIONS IN INDONESIA (CASE STUDY FOR THE
ESTABLISHMENT OF A JUNIOR ATTORNEY GENERAL FOR
MILITARY CRIMES AT THE INDONESIA ATTORNEY
GENERAL' OFFICE)**

FEBRINA RAHMAWATI

Abstract

Military institutions throughout the country have a special judicial mechanism known as military justice. Judicial jurisdiction does not look at criminal acts based of the perpetrator, but based on the offense or crime committed. The formation of the organizational structure and working procedures of the Deputy Attorney General for Military Crime (Jampidmil) at the Indonesian Attorney General's Office can bridge the need for criminal prosecution of subjects of civil law and subjects of military law. This study aims to describe the change in the legitimacy of military prosecution in Indonesia with the establishment of a new work unit at the Indonesia Attorney General's Office, namely the Deputy Attorney General for Military Crimes. The type of research used is normative juridical. This research focuses on laws relating to the structure and how the process or procedures for enforcing military law in the military prosecution system

Keywords: Deputy Attorney General for Military Crime, connectivity crime.